

## **Kajian Awal Hasil Pemantauan, Penggunaan SIREKAP Dan SIWASLU Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Mahkamah Konstitusi**

Oleh :

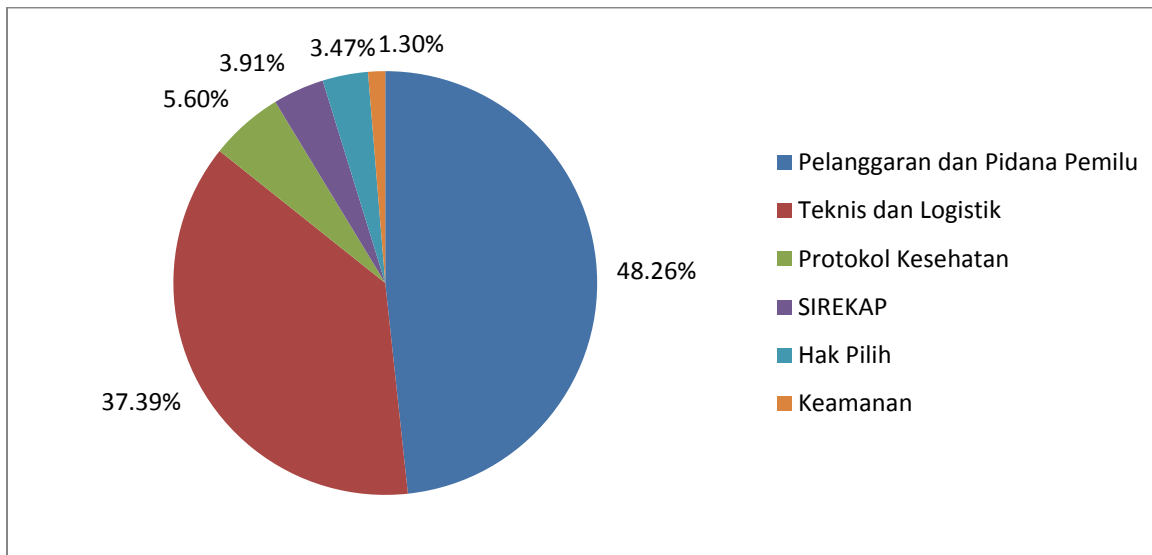
**Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif**

### **A. Pemantauan Kode Inisiatif dari Media**

Kode Inisiatif selama penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 melakukan pemantauan melalui media elektronik dan pemberitaan di berbagai daerah penyelenggara Pilkada. Berdasarkan data yang terhimpun, Kode Inisiatif berhasil memotret setidaknya 6 kategori besar yakni Pelanggaran dan Pidana Pemilu, Kendala Teknis dan Logistik, Pelanggaran protocol kesehatan, SIREKAP, Hak Pilih dan Keamanan. Dari 6 kategori tersebut, Kode berhasil memotret kejadian di 26 Provinsi dan 106 Kabupaten/Kota. Untuk provinsi yang berhasil dipotret yakni Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dan Yogyakarta.

Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, 106 daerah tersebut adalah Bandung, Banggai, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Banjar, Banjarbaru, Batanghari, Belu, Bengkulu, Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Binjai, Bolaang Mongondow Timur, Bontang, Bungo, Buol, Cianjur, Cilegon, Demak, Depok, Donggala, Dumai, Halmahera Utara, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Indragiri Hulu, Indramayu, Jambi, Kaimana, Karawang, Karo, Keerom Kepulauan Aru, Kepulauan Meranti, Kerinci, Konawe Selatan, Kuantan Singingi, Kutai Timur, Lampung tengah, Lombok Utara, Mahakam Ulu, Majene, Malaka, Maluku Barat Daya, Mamberamo Raya, Mamuju, Mamuju Tengah, Manggarai, Manggarai Barat, Merauke, Mukomuko, Musi Rawas, Musirawas Utara, Nabire, Ngada, Nunukan, Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Oku Selatan, Oku Timur, Palu, Pandeglang, Pangandaran, Parigi Moutong, Pelalawan, Penukal Abab Lematang Ilir, Pesawaran, Pesisir Barat, Pohnohuatu, Pulau Taliabu, Purbalingga, Rejang Lebong, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Sabu Raijua, Samarinda, Samosir, Semarang, Seram Bagian Timur, Serang, Serdang Bedagai, Siak, Sigi, Sleman, Sragen, Sukabumi, Sumba Barat, Sumba Timur, Sungai Penuh, Supiori, Tangerang Selatan, Tanjab Timur, Tanjung Jabung Barat, Tanjungbalai, Tapanuli Selatan, Tasikmalaya, Ternate, Timor Tengah Utara, Tojo Una-Una, Toli-Toli, Waropen, Wonogiri, Yahukimo, Yalimo.

**Table 1 Kategori dan Jumlah Temuan Kode Inisiatif**



Kode Inisiatif melakukan pemantauan media mulai dari 8 hingga 10 Desember 2020 terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020. Temuan tersebut diklasifikasikan menjadi 6 kategori yakni :

1. Pelanggaran dan Pidana Pemilu
2. Teknis dan Logistik
3. Protokol Kesehatan
4. SIREKAP
5. Hak Pilih
6. Keamanan

Dari 6 kategori tersebut, Temuan terbanyak *pertama* adalah kategori Pelanggaran dan Pidana Pemilu sebanyak 48.26%. Temuan pelanggaran dan pidana pemilu ini di dominasi oleh Politik Uang sebanyak 66 temuan, kedua adalah Netralitas ASN yang masih terjadi saat pemungutan suara sebanyak 25 temuan, Pemilih yang tidak berhak memilih sebanyak 7 temuan, kampanye dimasa tenang sebanyak 3 temuan dan juga temuan surat suara rusak sebanyak 2 temuan hingga penganiayaan timses yang masing-masing sebanyak 1 temuan. *Kedua*, adalah teknis dan logistic seperti surat suara hingga kebutuhan APD dalam Pilkada 2020. Setidaknya dari 230 temuan, 37,39% adalah persoalan logistic. Misalnya 51 distrik di Yahukimo yang mengalami kendala logistic. Temuan *ketiga*, adalah protocol kesehatan sebanyak 5,60%. Protokol kesehatan pada Pilkada di tengah pandemic memang perlu diapresiasi karena rata-rata penerapan protocol kesehatan di TPS sudah baik.

Hal ini juga selaras dengan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil (Kode Inisiatif, Perludem, Netgrit, Netfid, KISP, JaDI dan Kemitraan). Berdasarkan data hasil pemantauan Koalisi sampai tanggal 12 Desember 2020 Pukul 20.30, terdapat 127 Responden

yang mengisi formulir Pemantauan. Protokol Kesehatan di TPS Secara umum, hasil pemantauan dari koalisi menunjukkan bahwa aspek penerapan protokol kesehatan memang baik meskipun belum terjadi di seluruh TPS yang dipantau. Misalnya saja dalam hal penentuan lokasi TPS dibuat ditempat terbuka atau tertutup dan data menunjukkan 63,8% relawan pemantau kami mendapatkan bahwa TPS dibangun di tempat terbuka. Selanjutnya pemantauan juga menunjukkan bahwa 94,5% TPS yang digunakan sudah memenuhi standar dan prosedur protokol kesehatan Covid-19. Selain keadaan TPS, pemantauan juga menemukan bahwa kepatuhan terhadap protokol kesehatan telah dilakukan oleh 96,9% Pengawas TPS dan 93,7% Saksi pasangan calon yang hadir di TPS untuk mengawasi dan mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara. Meski data diatas menunjukkan adanya kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang baik, namun dari pemantauan mengenai “apakah terdapat antrian pemilih yang menyebabkan terjadinya kerumunan di TPS” sebanyak 18,1% melihat masih terjadi kerumunan dan sebanyak 81,9% melihat tidak ada antrian pemilih yang mengakibatkan kerumunan.

*Keempat*, adalah temuan SIREKAP yang hanya 3.91%, hal ini juga dikarenakan minimnya informasi soal SIREKAP kepada masyarakat dan informasi penyelenggaraan Pilkada lebih banyak pada aspek protocol kesehatan yang juga menyebabkan pemberitaan soal SIREKAP pada Pilkada sangat minim. *Kelima* temuan soal hak pilih seperti tidak bisa mencoblos temuan soal hak pilih seperti tidak bisa mencoblos karena tidak mendapatkan undangan dan ketidaktahuan pemilih bahwa bisa memilih hanya dengan e-ktip atau suket seperti di TPS 3 Brengam, Binjai Kota Sumatera Utara dan temuan ini juga terdapat di Kecamatan Sayung, Kab Demak, Distrik Arso, Kab. Keerom. Halmahera utara. Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Dan yang *Keenam* adalah soal keamanan penyelenggara. Misalnya di Distrik agreso, Kab Membramo raya ada kejadian pengambilan paksa terhadap kotak suara. Di Hulu Palik, dan Padang Kol di Bengkulu utara kekerasan yang ditujukan kepada penyelenggara.

## **B. Pemantauan SIREKAP dan SIWASLU Relevansinya Terhadap Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada.**

Penggunaan teknologi informasi sangat penting dan dapat membantu proses penyelenggaraan Pilkada khususnya ditahapan yang memang cukup krusial seperti pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. SIREKAP digunakan dengan tujuan untuk mempercepat proses rekapitulasi, meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas rekapitulasi perolehan suara. Begitu juga dengan SIWASLU untuk mempermudah proses pengawasan saat Pilkada.

Koalisi Masyarakat Sipil juga membuat pemantauan dengan menggunakan formulir pemantauan penggunaan SIREKAP di TPS Pilkada 2020. Dan berhasil diisi oleh 64 responden yang tersebar di beberapa wilayah. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun tersebut, Sebanyak 39,1% penggunaan SIREKAP tidak dapat dilakukan atau terdapat kendala dan 60,9% TPS SIREKAP digunakan. Pada hari pemungutan suara di Rabu, 9 Desember 2020, laman publikasi SIREKAP KPU dalam beberapa waktu tidak bisa diakses.

Sebanyak 54,7% hasil pemantauan responden mengakui terdapat kendala dalam penggunaan SIREKAP di TPS dan sebanyak 43,8% pemantauan responden melihat kendala penggunaan SIREKAP akibat aplikasi SIREKAP tidak bisa dibuka. Selain itu dalam proses Foto Formulir Model C.Hasil-KWK TPS hasil pemantauan menunjukkan 56,3% responden menjawab terjadi pengulangan dalam melakukan foto. Lebih lanjut sebanyak 57,8% hasil pemantauan responden menjawab terdapat kesulitan mengirim hasil foto Form C.Hasil KWK TPS.

Penggunaan SIREKAP di Pilkada 2020 juga ternyata minim sosialisasi khususnya kepada Pemilih. Berdasarkan data pemantauan dari 64 responden melihat 76,6% pemilih tidak mengetahui SIREKAP dan sebanyak 56,3% saksi pasangan calon tidak mengetahui SIREKAP. Padahal partisipasi masyarakat sangat penting khususnya berkaitan dengan transparansi dan pengawasan partisipatif yang dapat dilakukan oleh masyarakat terhadap penggunaan SIREKAP

### 1. SIREKAP dan Hasil Sementara Pemilihan Gubernur

Provinsi	Jumlah Paslou	% Suara Masuk Data SIREKAP	Suara Peringkat 1	Suara Peringkat 2	Selisih Suara	Peringkat 1 DATA SIREKAP	Peringkat 2 DATA SIREKAP	% Selisih Suara Pemenang 1 dan 2
Jambi	3	93.19	550866	543457	7.409	37.90%	37.4%	0.50%
Sulawesi Tengah	2	81.49%	723.261	491.083	232.006	59.60%	40.40%	19%
Kalimantan Utara	3	75.64%	115.337	87.195	28.142	44.90%	34.%	10.90%
Kalimantan Tengah	2	77.63%	411.336	391.518	19.818	51.20%	48.80%	2.4%
Bengkulu	3	87.74	368.964	285.211	83.753	41.30%	31.90%	9.4%
Sumatera Barat	4	75.61%	568653	517223	51.430	33.10%	30.10%	3%
Kalimantan Selatan	2	83.60%	699.292	693.226	6.066	50.20%	49.8%	0.40%
Kepulauan Riau	3	61.1	218859	174668	44191	43.60%	34.80%	9%
Sulawesi Utara	3	45.09%	385299	221575	163724	57.60%	33.10%	25%

Pada Senin, 14 Desember 2020, tahapan Pilkada akan memasuki tahap Pleno Terbuka Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali serta Gubernur dan Wakil Gubernur yang akan digelar mulai Senin 14 Desember - 17 Desember 2020. Jika melihat data yang terpublikasi dalam SIREKAP (**Hasil Pemantauan Terhadap Data Publikasi SIREKAP 14 Desember 2020 Pukul 12.30 WIB**) dari 9 Provinsi yang melaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Baru 1 yang mencapai angka 90% yakni Provinsi Jambi, dan 3 Daerah dengan Publikasi data mencapai 80% yakni Sulawesi Tengah, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan.

Sedangkan sisanya masih di bawah 80% dan bahkan 1 Provinsi yakni Sulawesi Utara baru mencapai 45.09%.

## **2. Potensial Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Tingkat Provinsi**

Pemantauan secara berkala yang dilakukan oleh Kode Inisiatif atas SIREKAP juga melihat, bahwa pergerakan suara hasil Pilkada di 9 Provinsi cenderung stagnan. Meski demikian, terdapat 3 daerah yang Pilgubnya akan sangat rawan dan membuka peluang untuk terjadinya sengketa hasil di MK yakni:

- a. Pilgub Kalimantan Selatan merupakan salah satu Pilkada dengan selisih yang tidak terpaut jauh antara paslon 1 dengan paslon 2. Berdasarkan Publikasi SIREKAP selisih perolehan suara 6.066 Suara atau 0.40% antara peringkat pertama dengan peringkat kedua. Belum lagi, Pilgub Kalimantan Selatan hanya diikuti oleh 2 Pasangan Calon dan salah satu Paslonnya adalah petahana. Jika selisih 0.40% ini masih bertahan hingga penetapan hasil, maka sangat dimungkinkan Pilgub Kalimantan Selatan akan bermuara di Mahkamah Konstitusi.
- b. Pilgub Provinsi Jambi dengan selisih perolehan suara 7.409 atau 0.50% antara peringkat pertama dengan peringkat kedua. Namun berdasarkan data SIREKAP, suara masuk pada Pilgub Jambi baru mencapai 93.19%. peluang perubahan suara masih dimungkinkan, namun jika kenaikan suara diantara paslon stagnan, maka sangat dimungkinkan Pilgub Jambi juga akan bermuara di Mahkamah Konstitusi.
- c. Pilgub Kalimantan Tengah, dengan selisih perolehan suara 19.818 atau 2.4% antara peringkat pertama dengan peringkat kedua. Namun berdasarkan data SIREKAP, suara masuk pada Pilgub Jambi baru mencapai 77.63%. peluang perubahan suara masih dimungkinkan, namun jika kenaikan suara diantara paslon stagnan, maka sangat dimungkinkan Pilgub Kalimantan Tengah juga akan bermuara di Mahkamah Konstitusi.

## **3. Potensial Sengketa Hasil di Mahkamah Konstitusi untuk Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota.**

Berdasarkan pemantauan data melalui Publikasi SIREKAP, Kode Inisiatif mencoba melakukan pemetaan terhadap Kabupaten/Kota yang potensial untuk sengketa. Kriteria ini didasari dengan beberapa seperti Suara dan Persentase Suara yang masuk ke Publikasi SIREKAP, Selisih sementara suara paslon pemenang dengan nomor urut dibawahnya sesuai dengan ambang batas pengajuan sengketa di MK dari 0,5% hingga 2%.

Berdasarkan hasil pemantauan Kode Inisiatif. Dari 261 Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pilkada di 2020, 62 Daerah sangat potensial untuk mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Data tersebut, jika di rinci berdasarkan Kabupaten atau Kota. Setidaknya, 9 Kota dari 37 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sangat potensial untuk

mengajukan sengketa di MK. Sedangkan, dari 53 dari 224 Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sangat potensial mengajukan sengketa di MK. Berikut list daerah potensial mengajukan sengketa ke MK :

**a. 9 Daerah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota yang potensial mengajukan sengketa adalah :**

Jenis Pemilihan	Daerah
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Bontang
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Makassar
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Medan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Metro
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Samarinda
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Solok
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Surabaya
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Tangerang Selatan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	Ternate

**b. 53 Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang potensial mengajukan sengketa adalah :**

Jenis Pemilihan	Daerah
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Banyuwangi
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Belitung Timur
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Belu
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Dompu
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Gresik
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Gunungkidul



Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Halmahera Selatan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Halmahera Utara
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Jembrana
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Karimun
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Karo
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Kaur
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Ketapang
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Kolaka Timur
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Konawe Selatan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Kotabaru
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Lampung Selatan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Lampung Timur
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Lebong
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Lingga
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Luwu Timur
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Malaka
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Malang
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Mamuju
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Manggarai Barat
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Melawi
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Morowali Utara

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Muna
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Musi Rawas
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Natuna
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Nias Barat
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Nias Selatan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Nunukan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Pangandaran
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Pasaman Barat
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Penukal Abab Lematang Ilir
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Potensi
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Pulau Taliabu
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Purworejo
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Rembang
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Rokan Hilir
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Rokan Hulu
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Sekadau
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Sidoarjo
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Situbondo
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Solok Selatan
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Sukoharjo
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Sumba Barat



Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Sumbawa
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Sumenep
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Timor Tengah Utara
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Tojo Una-Una
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati	Wakatobi

#### 4. Keterpilihan Calon Tunggal di Pilkada 2020 berdasarkan SIREKAP

Setidaknya terdapat 25 Calon Tunggal di Pilkada 2020. Berdasarkan data SIREKAP, sudah ada 3 Daerah yang hasil inputnya telah mencapai 100%. 3 Daerah tersebut dapat dipastikan bahwa calon tunggal menang melawan kolom kosong. 3 Daerah tersebut adalah, di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara Paslon tunggal mendapatkan 77.40%. Di Kabupaten Kediri, Jawa Timur Paslon tunggal mendapatkan 73.30%. dan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan Paslon tunggal mendapatkan 86.3%.

Selain itu, terdapat 14 daerah yang calon tunggalnya *sangat potensial menang* dan berhasil mengalahkan kolom kosong yakni : Kabupaten Gowa, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kota Semarang, Kabupaten Kebumen, Kota Balikpapan, Kabupaten Badung, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Sragen. Sedangkan masih ada 8 Daerah dengan calon tunggal yang masih menunggu hasil karena suara masuk berdasarkan data SIREKAP masih berpeluang adanya perubahan.

Tingkat Pilkada	Provinsi	Kab/Kota	% Suara Masuk Data SIREKAP	Suara Peringkat 1	Suara Peringkat 2	Selisih Suara	Suara Paslon Tunggal	Suara Kolom Kosong	% Selisih Suara
Pemilihan Walikota	Sumatera Utara	Pematangsiantar	100%	87449	25559	61890	77.40	22.60	54.80
Pemilihan Bupati	Jawa Timur	Kediri	100%	590317	214591	375726	73.30%	26.70%	46.60%
Pemilihan Bupati	Sulawesi Selatan	Soppeng	100%	114030	18056	95974	86.3%	13.70%	72.6%
Pemilihan Bupati	Sulawesi Selatan	Gowa	99.37%	375236	36794	338442	91.10%	8.90%	82.20%
Pemilihan Bupati	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	97.54%	204837	8123	196714	96.20%	3.80%	92.40%
Pemilihan Bupati	Jawa Timur	Ngawi	95.88%	450595	27136	423459	94.30%	5.70%	88.60%

Pemilihan Bupati	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu	94.62%	111636	59770	51866	65.10%	34.90%	30.20%
Pemilihan Bupati	Sumatera Utara	Humbang Hasundutan	87.79%	45847	41544	4303	52.50%	47.50%	5.00%
Pemilihan Walikota	Jawa Tengah	Semarang	86.63%	621240	57744	563496	91.50%	8.50%	83.00%
Pemilihan Bupati	Jawa Tengah	Kebumen	84.47%	330451	211373	119078	61%	39%	22%
Pemilihan Walikota	Kalimantan Timur	Balikpapan	81.66%	130568	79337	51231	62.2	37.8	24.4
Pemilihan Bupati	Bali	badung	78.31%	223819	12051	211768	94.90%	5.10%	89.80%
Pemilihan Bupati	Nusa Tenggara Barat	sumbawa barat	75.60%	42488	13916	28572	75.30%	24.70%	50.60%
Pemilihan Bupati	Sulawesi Barat	Mamuju Tengah	74.09%	50525	2490	48035	95.30%	4.70%	90.60%
Pemilihan Bupati	Papua Barat	Raja Ampat	73.66%	15773	9551	6222	62.30%	37.70%	24.60%
Pemilihan Bupati	Sumatera Barat	Pasaman	64.36%	70105	11398	58707	86.00%	14.00%	72.00%
Pemilihan Bupati	Jawa Tengah	Boyolali	63.81%	423066	19677	403389	95.60%	4.40%	91.20%
Pemilihan Bupati	Jawa Tengah	Wonosobo	63.08%	168996	98144	70852	63.30%	36.70%	26.60%
Pemilihan Bupati	Bengkulu	Bengkulu Utara	62.32%	65937	28242	37695	70%	30%	40%
Pemilihan Bupati	Jawa Tengah	Sragen	60.68%	264013	61425	202588	81.10%	18.90%	62.20%
Pemilihan Walikota	Sumatera Utara	Gunungsitoli	55.37%	25861	7442	18419	77.70%	22.30%	55.40%
Pemilihan Bupati	Jawa Tengah	grobogan	42.28%	247170	39089	208081	86.30%	13.70%	72.60%
Pemilihan Bupati	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	42.01%	80039	32032	48007	71.40%	28.60%	42.80%
Pemilihan Bupati	Papua Barat	Manokwari Selatan	19.64%	4983	703	4280	87.60%	12.40%	75.20%
Pemilihan Bupati	Papua Barat	Pegunungan Arfak	0%			0		#REF!	#REF!

## 5. Antisipasi Sengketa di Mahkamah Konstitusi melalui Optimalisasi SIREKAP dan SIWASLU

Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Kode Inisiatif selama penyelenggaraan Pilkada serentak dari tahun 2015, 2017, 2018. Setidaknya terdapat 8 Dalil yang potensial akan menjadi dasar gugatan Paslon yang kalah ke Mahkamah Konstitusi yakni :

- a. **Persoalan Hak Pilih** (Suket Fiktif, Memilih lebih dari satu kali, Pemilih tidak berhak memilih namun memilih, Memilih lewat waktu pemilihan, Pemilih dibawah umur, Pemilih yang memilih hanya menggunakan secarik kertas berstempel KPPS, PSU)
- b. **Persoalan Kesalahan Penghitungan dan Pengurangan Suara** (Perolehan suara tidak sesuai dengan penghitungan suara, Surat Suara sengaja dirobek, Kesalahan Penghitungan, Kotak suara kosong saat rekap, Perbedaan jumlah surat suara bupati dan gubernur, Manipulasi Jumlah Surat Suara, Penghitungan suara dicatat dengan tulisan kurang jelas, KPPS keliru menetapkan suara).
- c. **Persoalan Manipulasi DPT** (Memilih lebih dari satu kali, Suara sah melebihi DPT, Pemalsuan atau rekayasa data ganda DPT, Pencoblos diluar DPT, Penggunaan Suket yang belum diterima pemilih, Validitas DPT, Pemilih tidak terdaftar di DPT).
- d. **Netralitas Penyelenggara Pilkada** (KPPS bekerjasama dengan saksi Paslon, Panwaskab menolak persoalan sengketa, Panwaskab tidak menindaklanjuti laporan, Profesionalitas KPPS, KIP, Intimidasi saksi dilarang masuk TPS oleh petugas, Pelanggaran administrasi tidak ditindaklanjuti Panwas, Pelanggaran oleh penyelenggara dan panwaskab)
- e. **Polemik Menuju dan Saat Pemungutan dan Penghitungan Suara** (KPU coblos surat suara KPPS sengaja tidak mengeluarkan daftar hadir C7 dan C7 KWK, Distribusi C6, KPU abaikan rekomendasi Panwas dan Panwaskab, KPU manipulasi pelaksanaan putusan panwaskab, Tidak konsisten dalam menentukan surat suara sah dan tidak sah, Kampanye dimasa tenang dan diluar jadwal, Kotak suara dibawa dan dibongkar secara melawan hukum, KPU memindahkan TPS, Pemasangan APK tidak sesuai, Pemilih tanpa KTP, Daftar hadir pemilih tidak diberikan kepada pemilih, Kampanye disarana pendidikan, Pemohon tidak menerima hasil real count C1 KPU, Perusakan dan Pembukaan kotak suara, APK tidak sesuai aturan, Blackcampaign, KPU tidak siapkan TPS, Pelanggaran Administratif, KPU tidak melakukan pemungutan suara di beberapa distrik).
- f. **Penggunaan Politik Uang** (Memberikan sembako, menjanjikan sesuatu, memberikan uang)
- g. **Polemik Politisasi Birokrasi** (Petahana mengganti pejabat, Keterlibatan ASN dalam pemenangan, Intimidasi Kades, Keterlibatan Aparat Desa, Keterlibatan Pejabat BUMD, Petahana menggunakan fasilitas Negara, Sekda mengkoordinir ketua RT, kelurahan, KPPS untuk mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih, Mobilisasi masa dengan kendaraan dinas, Pergantian RW mendadak)
- h. **Persoalan Syarat Pencalonan** (Meloloskan Bakal Paslon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi, Mengikutsertakan Paslon yang telah dibatalkan dalam Pilkada, Pembatalan Pemohon sebagai Paslon, Penggunaan ijazah palsu dan keterlambatan menyerahkan LHKPN, Dukungan Parpol tidak sah).

Delapan problem diatas sebetulnya dapat diminimalisir terkait dengan kesalahan ataupun kesengajaan dengan penggunaan IT. Pada tahapan pemungutan, penghitungan hingga rekap misalnya, SIREKAP akan sangat membantu terjadinya persoalan-persalan diatas. Problem diatas

juga dapat di potret melalui SIWASLU dan pengawas bisa dengan segera menindaklanjuti temuan dan terekam di dalam sistem. Hal ini juga dapat memudahkan aspek pembuktian yang selama ini menjadi problem saat sengketa hasil di MK.

**Narahubung :**

**Muhammad Ihsan Maulana – Koordinator Harian Kode Inisiatif (0812-9290-9933)**